

## DPRD DKI Jakarta Minta Pemprov Buka Posko Pengaduan KDRT Tingkat RW

JAKARTA (IM) - Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan agar Pemprov DKI melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) membuka posko untuk menerima aduan warga mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Langkah itu dilakukan untuk menekan kasus KDRT di Jakarta.

Posko tersebut diusulkan ada di tingkat Rukun Warga (RW) dan para petugasnya dibekali pengetahuan mengenai penanganan yang perlu dilakukan bagi korban KDRT, dan mencegah hal buruk pasca terjadinya KDRT.

“Dengan adanya posko di tingkat RW, nantinya petugas bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga bisa tau kondisi yang dialami. Sebenarnya menurut saya kejadian ini banyak terjadi tapi tidak terungkap, maka rajin-rajinlah bersosialisasi dan dengarkan keluhan masyarakat,” kata Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria dalam keterangannya, Senin (11/12).

Dia turut meminta Dinas PPAPP menyediakan psikiatra dan psikolog pada setiap

posko untuk memberikan penyuluhan tentang rumah tangga, mendampingi hingga menyembuhkan trauma para korban yang mengalami KDRT.

“Jadi kalau ada apa-apa bisa lari ke tempat situ, nah itu kan harus dekat dengan masyarakat. Kalau di tingkat Kecamatan kan kejauhan dia, cakupannya dikecilin lagi, kalau bisa di pos RW harus ada,” tuturnya.

Dia juga mengimbau para korban KDRT untuk segera melaporkan dan tidak malu ataupun takut saat mendapat KDRT. Menurutnya, dengan begitu diharapkan dapat meminimalisir kasus dan korban kekerasan.

“KDRT ini kan memang agak susah ya, ada yang takut melaporkan, ada yang takut untuk dibawa ke permukaan, malu dan lain-lain ya,” tutup Iman.

Sebagai informasi tambahan, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemempn) menyebutkan Jakarta menduduki peringkat ketiga dengan kasus terbanyak di Indonesia dengan jumlah 781 kasus periode 1 Januari hingga 20 Juni 2023. ● yan

## Dinas Kesehatan DKI Temukan 2 Kasus Kematian Positif COVID-19

JAKARTA (IM) - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menemukan dua kasus kematian positif COVID-19 pada Desember 2023.

“Kasus ini ditemukan setelah sebelumnya dua bulan berturut-turut, Oktober dan November tidak ada kematian COVID-19 di DKI Jakarta,” kata Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ngabila Salama dalam keterangannya, Senin (11/12).

Dua kasus kematian positif Covid-19 ini terjadi pada dua pasien wanita lansia. Pertama, berusia 81 tahun dengan penyakit komorbid hipertensi, sudah vaksinasi dosis ketiga tapi belum dosis keempat.

Kedua, berusia 91 tahun dengan penyakit komorbid stroke, gagal jantung, dan belum vaksin sama sekali.

Menurut Ngabila, telah ditemukan 80 kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai dengan 3 Desember 2023 di wilayah DKI Jakarta. Sebanyak 90 persen bergejala ringan, serta 10 persen bergejala sedang dan dirawat di rumah sakit.

Ngabila menyatakan kondisi penularan Covid-19 di Jakarta masih sangat terkendali. “EG.4 dan EG.5 masih yang dominan ditemukan di Jakarta dengan masing-masing sudah 14 kasus ditemukan,” ujarnya.

Ia menjelaskan status COVID-19 sudah endemi di Indonesia sejak Juni 2023. Artinya, tanggung jawab utama kesehatan ada pada diri masing-masing masyarakat. Ngabila mengatakan

sejak status endemi diberlakukan, pemerintah hanya memberikan imbauan dan menyediakan fasilitas kesehatan.

Sejauh ini, kata Ngabila, belum dibuktikan pembatasan aktivitas. Namun, pemerintah tidak akan berhenti untuk mengimbau untuk lebih ketat bermasker, lebih rajin mencuci tangan, jaga ventilasi udara indoor baik, hindari asap rokok.

Selanjutnya, menyediakan fasilitas untuk melengkapi imunisasi rutin anak gratis dari pemerintah ada 15 jenis, serta vaksinasi COVID-19 dosis satu sampai dengan empat.

Dinkes DKI mengimbau kelompok rentan untuk segera melengkapi vaksinasi COVID-19 karena jika positif berpotensi besar terjadi keparahan atau meninggal. Usia di atas 50 tahun yang belum melengkapi vaksin; memiliki komorbid hipertensi, diabetes mellitus, stroke, penyakit jantung, gagal ginjal kronis, kanker, TBC, HIV, dan gangguan imunitas lainnya adalah orang-orang yang harus dipastikan vaksinasinya lengkap.

Lokasi vaksinasi COVID-19 DKI Jakarta ada di Puskesmas Kecamatan DKI Jakarta di jam kerja. Ada tambahan lokasi lain, yaitu:

RSUD Tarakan Jakarta Pusat Senin-Sabtu jam 08.00-12.00

Klinik PPKP Kantor Balai kota DKI Jakarta Senin-Jumat jam 13.00-16.00

Klinik Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok Senin-Jumat jam 08.00-15.00. ● yan

**PENGUMUMAN**

Telah Hilang Girik C.280, Persil 5 D.IV, Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, RT.01/RW.05, Pemilik atas nama: PT.Pandhega Shora, berdasarkan akta Jual Beli Bangunan dan Pelepasan Hak Nomor 14, Tanggal 23 Maret 2010, NY. Masneri, S.H., Notaris DKI Jakarta.

Yang menemukan mohon diserahkan kepada kantor :

H. TEDDY ANWAR, SH, SpN  
Jl. Bendungan Hilir Raya No. 80  
Telp : 021-5736634

**PENGUMUMAN**

Telah Hilang Girik C.280, Persil 5 D.IV, Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, RT.01/RW.05, Pemilik atas nama: PT.Pandhega Shora, berdasarkan akta akta Jual Beli Bangunan dan Pelepasan Hak Nomor 15, Tanggal 23 Maret 2010, NY. Masneri, S.H., Notaris DKI Jakarta.

Yang menemukan mohon diserahkan kepada kantor :

H. TEDDY ANWAR, SH, SpN  
Jl. Bendungan Hilir Raya No. 80  
Telp : 021-5736634

**PENGUMUMAN**

Telah Hilang Girik C.550, Persil 5 D.IV, Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, RT.08/RW.05, Pemilik atas nama: PT.Pandhega Shora, berdasarkan akta Pelepasan Hak Nomor 11, Tanggal 27 Agustus 2013, NY. Masneri, S.H., Notaris DKI Jakarta.

Yang menemukan mohon diserahkan kepada kantor :

H. TEDDY ANWAR, SH, SpN  
Jl. Bendungan Hilir Raya No. 80  
Telp : 021-5736634

**PENGUMUMAN**

Telah Hilang Girik C.550, Persil 5 D.IV, Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, RT.08/RW.05, Pemilik atas nama: PT.Pandhega Shora, berdasarkan akta Pelepasan Hak dan Kuasa Nomor 116, Tanggal 29 Mei 2019, Teddy Anwar, S.H., Notaris DKI Jakarta.

Yang menemukan mohon diserahkan kepada kantor :

H. TEDDY ANWAR, SH, SpN  
Jl. Bendungan Hilir Raya No. 80  
Telp : 021-5736634

**PENGUMUMAN**

Telah Hilang Girik C.550, Persil 5 D.IV, Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, RT.02/RW.05, Pemilik atas nama: PT.Pandhega Shora, berdasarkan akta Pelepasan Hak dan Kuasa Nomor 116, Tanggal 29 Mei 2019, Teddy Anwar, S.H., Notaris DKI Jakarta.

Yang menemukan mohon diserahkan kepada kantor :

H. TEDDY ANWAR, SH, SpN  
Jl. Bendungan Hilir Raya No. 80  
Telp : 021-5736634

**PENGUMUMAN**

Telah Hilang Girik C.25, Persil 5 D.II, Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, RT.02/RW.05, Pemilik atas nama: PT.Pandhega Shora, berdasarkan akta Pelepasan Hak dan Kuasa Nomor 116, Tanggal 29 Mei 2019, Teddy Anwar, S.H., Notaris DKI Jakarta.

Yang menemukan mohon diserahkan kepada kantor :

H. TEDDY ANWAR, SH, SpN  
Jl. Bendungan Hilir Raya No. 80  
Telp : 021-5736634

# 4 | Metropolis

FOTO/ANTARA

## DIALOG APINDO CAPRES 2024



### ANIES HADIRI DIALOG APINDO BERSAMA CAPRES 2024

Ketua Apindo Shinta W Kamdani (tengah) memberikan buku ‘Roadmap Perekonomian Apindo’ kepada Capres nomor urut satu Anies Baswedan (kedua kiri) didampingi Ketua Dewan Pakar APINDO Mari Elka Pangestu (kedua kanan), Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bobby Gafur Umar (kiri), dan moderator Gita Wirjawan (kanan) saat menghadiri Dialog Apindo bersama Capres 2024 di Jakarta, Senin (11/12).

## Stasiun Pompa Sentiong Diresmikan, Kurangi Banjir Jakarta Hingga 62%

Stasiun Pompa Ancol Sentiong akan bisa mengurangi banjir kiriman dari Bogor. “Saya sampaikan karena memang dari atas akhirnya juga ke sini, ke Pluit. Tapi ini adalah Pompa terbesar yang dibangun Kementerian PU dan kita harapkan sangat mengurangi banjir yang ada di DKI Jakarta,” kata Presiden Jokowi.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Stasiun Pompa Ancol Sentiong di Jakarta Utara, DKI Jakarta, Senin (11/12). Stasiun pompa air yang menghabiskan anggaran

Rp481 miliar itu diklaim akan mengurangi banjir di 7 kecamatan wilayah DKI Jakarta. Presiden Jokowi mengharapkan Stasiun Pompa Ancol Sentiong yang baru saja diresmikan bisa mengurangi

banjir di Jakarta hingga 62%.

“Pada hari ini telah selesai Stasiun Pompa Air Sentiong di Ancol yang menelan biaya Rp481 miliar. Diharapkan dengan selesainya tadi di hulu, di tengah, di hilir, di Sentiong ini, kita harapkan banjir di Jakarta bisa berkurang kurang lebih 62%,” ungkap Jokowi saat meresmikan Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Senin (11/12).

“Ini saya kira akan banyak sekali mengurangi daerah-daerah yang biasanya terkena banjir di DKI Jakarta. Dan ini khusus untuk Pompa Sentiong ini akan mengurangi banjir di 7 kecamatan. Tujuh Kecamatan di Pademangan,

Senen, Johar Baru, dan lain-lain,” kata Jokowi usai meresmikan Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Jakarta Utara, DKI Jakarta.

Menurut Jokowi, Stasiun Pompa Ancol Sentiong sebagai langkah antisipasi banjir yang kini mulai masuk musim hujan. Apalagi, sebelumnya pemerintah telah membangun dua bendungan di hulu Jakarta yakni Bendungan Ciawi dan Sukamahi.

“Ini kan sudah musimnya hujan, tapi persiapan kita Jakarta kan sudah dibangun Bendungan Ciawi dan Sukamahi, di atas, di hulu,” kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengatakan normalisasi Sungai Ciliwung juga terus dilakukan yang kini tinggal 17 kilome-

ter. “Kemudian juga sodetan Ciliwung sudah selesai juga, masuk air dari Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur. Kemudian normalisasi Sungai Ciliwung juga dalam proses, tinggal 17 kilo. Dan yang paling bawah sekarang di Ancol, di Sentiong yaitu Stasiun Pompa Air Sentiong,” katanya.

Jokowi memastikan Stasiun Pompa Ancol Sentiong akan bisa mengurangi banjir kiriman dari Bogor. “Saya sampaikan karena memang dari atas akhirnya juga ke sini, ke Pluit. Tapi ini adalah Pompa terbesar yang sudah dibangun oleh Kementerian PU dan kita harapkan akan sangat-sangat mengurangi banjir yang ada di DKI Jakarta, utamanya di 7 kecamatan,” katanya. ● yan

## BPN Kota Depok Targetkan Tahun 2024 Seluruh Tanah Wakaf Bersertifikat



FOTO: DOK/BPN KOTA DEPOK

Kepala BPN Kota Depok, Indra Gunawan memberikan penjelasan kepada warga yang ingin berkonsultasi terkait hal-hal yang berhubungan dengan pertanahan dan syarat yang wajib disertakan.

DEPOK (IM) - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Indra Gunawan kembali mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mendaftarkan tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat. Diharapkan pada tahun 2024 mendatang, seluruh tanah wakaf di Kota Depok dapat terdaftar dan bersertifikat.

“Harapan kami jika ada tanah-tanah wakaf yang belum selesai disertifikatkan, kami berkewajiban untuk segera menyelesaikan, dan Insya Allah sebelum akhir 2024 seluruh tanah wakaf yang belum disertifikatkan itu bisa diajukan,” ujar Indra Gunawan kepada wartawan, Senin (11/12).

Indra Gunawan mengatakan BPN Kota Depok terus berkoordinasi dengan organisasi keagamaan terkait data tanah wakaf yang belum bersertifikat. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan MUI, PBNU, PB Muhammadiyah dan Pengurus Pusat (PP) Persatuan Islam (Persis).

Mendaftarkan tanah wakaf menjadi kewajiban dari pemerintah maupun masyarakat

pemilik tanah itu sendiri. Sebab, dengan disertifikatkannya tanah wakaf, maka dapat terhindar dari konflik atau sengketa pertanahan.

“Apabila tanah wakaf itu tidak segera disertifikatkan, dikhawatirkan di kemudian hari ahli warisnya ada yang masih mengorek-ngorek, ini susah untuk bisa menyelesaikannya. Kadang kakeknya, neneknya sudah mewakafkan tanahnya untuk kepentingan ibadah, oleh sebab itu segera diselesaikan saja,” papar Indra Gunawan.

BPN Kota Depok akan segera menyelesaikan seluruh tanah wakaf termasuk rumah ibadah lainnya, tentu dengan ketentuan dan syarat yang diwajibkan.

Berikut ini syarat yang harus dipersiapkan oleh setiap pemohon mendaftarkan tanah wakaf yang belum bersertifikat:

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materi cukup.
2. Surat kuasa apabila dikuasakan.
3. Fotokopi identitas pemohon/nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya

oleh petugas loket.

4. Surat pengesahan nadzir.

5. Akta ikrar wakaf /surat ikrar wakaf.

6. Fotokopi SPPT PBB Tahun Berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.

7. Sertifikat Asli (bagi yang sudah sertifikat) atau surat-surat pemilihan tanah bagi tanah hak milik yang belum bersertifikat.

8. Fotokopi identitas wakaf yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas.

9. Pernyataan tanggung waktu wakaf.

10. Surat Keterangan dari Lurah bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.

Dari ketentuan yang ada, untuk jangka waktu pengurusan sekitar 98 hari untuk tanah yang belum bersertifikat, dan lima hari untuk tanah yang sudah bersertifikat.

“Proses ini tidak dipungut biaya. Dengan catatan memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Kami BPN Kota Depok tentu akan membantu proses pendaftaran tanah wakaf dapat berjalan dengan lancar dan cepat seperti yang diharapkan,” pungkas Indra Gunawan. ● ber

## Ribuan Orang dari 27 Kampung DKI Demo Tuntut Hak Tempat Tinggal Layak

JAKARTA (IM) - Ribuan warga yang berasal dari 27 kampung di Jakarta menggelar demo hari ini menuntut hak atas tempat tinggal layak. Massa berkumpul di depan gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Jakarta Pusat pukul 11.00 WIB lalu menggeruduk Balai Kota DKI dua jam kemudian.

Koordinator Umum Aksi, Gugun Muhammad mengatakan masih banyak permukiman warga Ibu Kota yang tidak layak huni. Dia mencatat beberapa program pembangunan hunian milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini terhalang kebijakan pemerintah pusat yang diskriminatif.

“Tidak mengikutsertakan permukiman informal dalam program-program perumahan dengan alasan status tanah yang tidak ilegal,” ucap Gugun dalam keterangan tertulisnya pada Senin (11/12).

Massa aksi hari ini adalah warga yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota Jakarta (JRMK) dan Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB). Ada empat tuntutan yang mereka sarankan kepada Pemprov DKI.

Pertama, meminta pemangku Tower E serta sarana dan prasarana Kampung Susun Akurium dilanjutkan hingga rampung. Kedua, menuntut agar eks warga Kampung Bayam dapat menempati Kampung Susun Bayam dengan merujuk pada skema yang diterapkan di Kampung Susun Akurium.

Ketiga, Pemprov DKI menagih kewajiban penyerahan tanah dari PT. Emticon agar lahan tersebut dapat digunakan warga Kampung Lengkong, Cilincing, Jakarta Utara.

Keempat, Pemprov DKI segera menerbitkan surat keputusan (SK) penetapan lokasi konsolidasi tanah di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara.

“Kami menuntut agar Gugus Tugas Reforma Agraria DKI Jakarta bekerja sama dengan Tim Percepatan Reforma Agraria Pusat untuk menetapkan lokasi-lokasi yang kami usulkan guna menyelesaikan permasalahan dan penataan akses melalui permukiman,” tutur Gugun. ● yan

DATA UNIT TARIKAN (UTN) PT. SINARMAS HANA FINANCE					
Bawah perjanjian pembiayaan :					
No.	Brand, Type & Color	Year	Transmission	Police Number	
1	KIA PICANTO 1.2 PUTH 2014	2014	A/T	D 1185 VCO	
2	SUZUKI ST150 - PICK UP HITAM 2013	2013	M/T	F 8034 AQ	
3	TOYOTA AGYA 1.0 G PUTH 2016	2016	A/T	B 2044 KMP	
4	HONDA MOBILIO DD4 1.5 S KID MERAH TUA METALIK 2019	2019	M/T	N 1241 EU	
5	TOYOTA B401RA - GQZFJ (CALYA 1.2 G) HITAM 2016	2016	A/T	B 1361 PYU	
6	TOYOTA NEW CAMRY 2.4 V (ACV40R-JEAGKD) SILVER METALIK 2007	2007	A/T	B 1463 ZQ	
7	DAIHATSU LUXIO 1.5 X (S402RG-ZQXFJJ JV) SILVER 2017	2017	A/T	B 1217 EOX	
8	TOYOTA VIOS 1.5 G (NCP93R-BEPGKD) SILVER METALIK 2008	2008	A/T	W 1460 AN	
9	SUZUKI SPLASH DR412 (4x2) ABU ABU METALIK 2013	2013	M/T	B 1916 BMB	
10	TOYOTA RUSH 1.5 G GDMFJ HITAM METALIK 2009	2009	M/T	AG 1969 SF	
11	MAZDA 2 1.5L HB R HJAU METALIK 2012	2012	A/T	AB 1659 FN	

telah cidera janji, harap hubungi kantor kami paling lambat tanggal 20 Desember 2023. Bilamana lewat batas waktu, maka kendaraan akan kami jual dan di perhitung kembali.

Horat Kami PT. SINARMAS HANA FINANCE - CS : (021) 5695 4670